



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI  
DANA LEMBAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEPADA LEMBAH TAHUN ANGGARAN 2017  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Bupati perlu menetapkan Peraturan Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembah, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Lembah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin pengalokasian Alokasi Dana Lembah, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang secara merata serta berkeadilan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembah, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Lembah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Lembang, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 66);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPADA LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2017.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

5. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
11. Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
13. Pengelolaan Keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Lembang.
14. Rencana Kerja Pemerintah Lembang, selanjutnya disingkat RKPL adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang, selanjutnya disingkat RPJML adalah program kerja Lembang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disingkat APBL, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Lembang, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah rekening tempat penyimpanan uang Lembang yang ditentukan oleh Kepala Lembang untuk menampung seluruh penerimaan Lembang dan membayar seluruh pengeluaran Lembang pada bank yang ditentukan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Maksud diberikan Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah untuk mengefektifkan pelaksanaan program yang berbasis Lembang secara merata dan berkeadilan.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah untuk membiayai program prioritas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 4

Sasaran Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah 112 (seratus dua belas) Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja.

#### Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## BAB III

### TATA CARA PENGHITUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Alokasi Dana Lembang

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADL dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat Lembang; dan
  - b. jumlah penduduk Lembang, angka kemiskinan Lembang, luas wilayah Lembang, dan tingkat kesulitan geografis Lembang.

### Pasal 7

- (1) ADL yang diterima tiap Lembang dihitung berdasarkan :
- a. Alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada Lembang sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah total ADL; dan
  - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Lembang sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari ADL dengan penghitungan bobot sebagai berikut:
    1. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
    2. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
    3. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
    4. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Lembang dan tingkat kesulitan geografis Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah angka kemiskinan Lembang dan IKG Lembang.

### Pasal 8

Penetapan rincian ADL setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua

#### Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

### Pasal 9

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Lembang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

### Pasal 10

Penetapan rincian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak

#### Dan Retribusi Daerah

### Pasal 11

- (1) Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk program skala prioritas dengan membiayai 4 (empat) bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan Lembang, bidang pelaksanaan pembangunan Lembang, bidang pembinaan kemasyarakatan Lembang dan bidang pemberdayaan masyarakat Lembang.
- (2) Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada RPJMLembang, RKP dan APBL Tahun Anggaran 2017.

Bagian Keempat  
Mekanisme dan Tahap Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindabukuan dari RKUD ke RKL.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - b. tahap I, pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang;
  - c. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang; dan
  - d. tahap III, pada bulan Nopember sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang;
- (3) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Lembang :
  - a. tahap I : surat keterangan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBL Tahun Anggaran sebelumnya dari Inpektorat Kabupaten Tana Toraja, Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBL Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Lembang tentang APBL Tahun Anggaran 2017.
  - b. tahap II : surat rekomendasi dari tingkat Kecamatan, Laporan Pertanggungjawaban penggunaan APBL Tahap I dan Laporan Realisasi semester I.
  - c. tahap III : surat rekomendasi dari tingkat Kecamatan dan Laporan pertanggungjawaban APBL Tahap II.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Lembang setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan pada bulan Maret bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Lembang Tahap I.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus sesuai jumlah yang diterima oleh masing-masing Lembang.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 14

- (1) Kepala Lembang dan/atau pengelola keuangan Lembang yang menggunakan APBL tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan akan diberi sanksi berupa pengurangan Alokasi Dana Lembang 10% (sepuluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang pada tahun berikutnya.
- (2) Kepala Lembang dan/atau pengelola keuangan Lembang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerugian Negara akan diproses dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah melalui dinas terkait;
- (2) Pemerintah Kecamatan wajib membina, monitoring dan mengawasi penyaluran, pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- (3) Pemerintah Kecamatan memberikan Rekomendasi kepada pemerintah

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI TANA TORAJA,



NIGODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale  
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



YUNUS SIRANTE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 06



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
 NOMOR : 06 TAHUN 2017  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPADA LEMBANG  
 TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN ALOKASI DANA LEMBANG KEPADA LEMBANG  
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	NAMA DESA / LEMBANG	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	SALUPUTI	SALUTANDUNG	384,746,527.23	99,441,680.39	484,188,207.62
2	SALUPUTI	REA TULAK LANGI	384,746,527.23	70,574,020.71	455,320,547.94
3	SALUPUTI	RATTE TALONGE	384,746,527.23	95,298,371.95	480,044,899.18
4	SALUPUTI	SA'TANDUNG	384,746,527.23	49,174,750.10	433,921,277.33
5	SALUPUTI	RA'BUNG	384,746,527.23	92,085,977.07	476,832,504.30
6	SALUPUTI	SALU	384,746,527.23	126,049,200.33	510,795,727.56
7	SALUPUTI	SALU BORONAN	384,746,527.23	108,681,123.71	493,427,650.94
8	SALUPUTI	BATU TIAKKA	384,746,527.23	112,306,505.15	497,053,032.38
9	BITTUANG	SE'SENG	384,746,527.23	118,441,421.83	503,187,949.06
10	BITTUANG	PALI'	384,746,527.23	86,046,688.91	470,793,216.14
11	BITTUANG	TIROAN	384,746,527.23	161,761,091.09	546,507,618.32
12	BITTUANG	BALLA	384,746,527.23	165,979,206.75	550,725,733.98
13	BITTUANG	LE'TEK	384,746,527.23	125,707,069.40	510,453,596.63
14	BITTUANG	KOLE PALIAN	384,746,527.23	135,714,314.65	520,460,841.88
15	BITTUANG	PATONGLOAN	384,746,527.23	98,814,564.59	483,561,091.82
16	BITTUANG	SASAK	384,746,527.23	117,876,687.95	502,623,215.18
17	BITTUANG	BAU	384,746,527.23	151,657,906.76	536,404,433.99
18	BITTUANG	SANDANA	384,746,527.23	139,101,186.01	523,847,713.24
19	BITTUANG	REMBO-REMBO	384,746,527.23	152,131,407.40	536,877,934.63
20	BITTUANG	BURASIA	384,746,527.23	140,790,608.43	525,537,135.66
21	BITTUANG	KANDUA'	384,746,527.23	149,290,986.10	534,037,513.33
22	BITTUANG	BUTTU LIMBONG	384,746,527.23	137,082,161.84	521,828,689.07
23	BONGGAKARADENG	BAU	384,746,527.23	156,843,857.54	541,590,384.77
24	BONGGAKARADENG	BUAKAYU	384,746,527.23	117,175,611.98	501,922,139.21
25	BONGGAKARADENG	MAPPA'	384,746,527.23	152,071,091.57	536,817,618.80
26	BONGGAKARADENG	POTON	384,746,527.23	152,613,088.96	537,359,616.19
27	BONGGAKARADENG	BAU SELATAN	384,746,527.23	216,914,545.80	601,661,073.03
28	MAKALE	LEA	384,746,527.23	65,253,543.64	450,000,070.87
29	SIMBUANG	SIMBUANG	384,746,527.23	141,639,325.63	526,385,852.86
30	SIMBUANG	PONGBEMBE	384,746,527.23	179,663,739.35	564,410,266.58
31	SIMBUANG	SIMBUANG BATUTALLU	384,746,527.23	185,110,515.10	569,857,042.33
32	SIMBUANG	MAKKODO	384,746,527.23	181,125,313.78	565,871,841.01
33	SIMBUANG	PONGBEMBE MESAKADA	384,746,527.23	161,082,689.89	545,829,217.12
34	RANTETAYO	MADANDAN	384,746,527.23	154,855,805.63	539,602,332.86
35	RANTETAYO	TAPPARAN UTARA	384,746,527.23	165,503,143.70	550,249,670.93
36	RANTETAYO	TONGLO	384,746,527.23	84,606,857.14	469,353,384.37
37	MENGKENDEK	GASING	384,746,527.23	150,768,637.94	535,515,165.17
38	MENGKENDEK	ULUWAY	384,746,527.23	117,431,070.93	502,177,598.16
39	MENGKENDEK	RANDANAN	384,746,527.23	127,641,500.90	512,388,028.13
40	MENGKENDEK	BUNTU TANGTI	384,746,527.23	89,504,196.33	474,250,723.56

41	MENGKENDEK	RANTE DADA	384,746,527.23	100,997,217.71	485,743,744.94
42	MENGKENDEK	PA'TENKOKO	384,746,527.23	83,757,377.47	468,503,904.70
43	MENGKENDEK	SIMBUANG	384,746,527.23	153,260,763.93	538,007,291.16
44	MENGKENDEK	PAKALA	384,746,527.23	111,446,027.71	496,192,554.94
45	MENGKENDEK	ULUWAY BARAT	384,746,527.23	101,652,100.12	486,398,627.35
46	MENGKENDEK	MARINDING	384,746,527.23	126,644,134.41	511,390,661.64
47	MENGKENDEK	PALIPU	384,746,527.23	111,192,945.82	495,939,473.05
48	MENGKENDEK	KE'PE TINORING	384,746,527.23	120,017,140.73	504,763,667.96
49	MENGKENDEK	BUNTU DATU	384,746,527.23	92,925,252.41	477,671,779.64
50	SANGALLA	BULIAN MASSA'BU	384,746,527.23	79,431,986.94	464,178,514.17
51	SANGALLA	KAERO	384,746,527.23	120,514,160.77	505,260,688.00
52	SANGALLA	TURUNAN	384,746,527.23	114,683,645.48	499,430,172.71
53	GANDANGBATU SILLANAN	BUNTU LIMBONG	384,746,527.23	162,188,832.02	546,935,359.25
54	GANDANGBATU SILLANAN	SILLANAN	384,746,527.23	110,613,219.56	495,359,746.79
55	GANDANGBATU SILLANAN	GANDANG BATU	384,746,527.23	140,415,821.21	525,162,348.44
56	GANDANGBATU SILLANAN	KADUAJA	384,746,527.23	141,463,380.38	526,209,907.61
57	GANDANGBATU SILLANAN	GARASSIK	384,746,527.23	81,833,054.98	466,579,582.21
58	GANDANGBATU SILLANAN	PEMANUKAN	384,746,527.23	87,264,089.58	472,010,616.81
59	GANDANGBATU SILLANAN	PERINDINGAN	384,746,527.23	150,698,268.31	535,444,795.54
60	GANDANGBATU SILLANAN	BUNTU TABANG	384,746,527.23	112,257,939.52	497,004,466.75
61	GANDANGBATU SILLANAN	BETTENG DEATA	384,746,527.23	68,251,349.18	452,997,876.41
62	REMBON	PALESAN	384,746,527.23	163,371,420.85	548,117,948.08
63	REMBON	BANGA	384,746,527.23	113,947,691.46	498,694,218.69
64	REMBON	ULLIN	384,746,527.23	95,671,794.11	480,418,321.34
65	REMBON	LIMBONG	384,746,527.23	130,154,674.80	514,901,202.03
66	REMBON	SARAPEANG	384,746,527.23	120,557,885.44	505,304,412.67
67	REMBON	BURI'	384,746,527.23	115,556,349.59	500,302,876.82
68	REMBON	MAROSON	384,746,527.23	147,333,347.66	532,079,874.89
69	REMBON	BATUSURA'	384,746,527.23	105,185,968.84	489,932,496.07
70	REMBON	BUA' TARRUNG	384,746,527.23	97,305,432.33	482,051,959.56
71	REMBON	TO'PAO	384,746,527.23	110,459,379.60	495,205,906.83
72	REMBON	KAYUOSING	384,746,527.23	182,123,785.90	566,870,313.13
73	MAPPAK	TANETE	384,746,527.23	140,151,263.11	524,897,790.34
74	MAPPAK	DEWATA	384,746,527.23	220,017,996.86	604,764,524.09
75	MAPPAK	MIALLO	384,746,527.23	146,877,033.13	531,623,560.36
76	MAPPAK	SANGPEPARIKAN	384,746,527.23	111,765,985.50	496,512,512.73
77	MAPPAK	BUTANG	384,746,527.23	111,851,893.07	496,598,420.30
78	MAKALE SELATAN	RANDAN BATU	384,746,527.23	200,720,401.83	585,466,929.06
79	MAKALE SELATAN	PATE'KE	384,746,527.23	142,985,414.38	527,731,941.61
80	MAKALE SELATAN	PA'BUARAN	384,746,527.23	221,173,363.28	605,919,890.51
81	MAKALE SELATAN	BO'NE BUNTU SISONG	384,746,527.23	184,145,737.48	568,892,264.71
82	MASANDA	RATTE	384,746,527.23	121,992,911.77	506,739,439.00
83	MASANDA	PALIORONG	384,746,527.23	106,008,170.23	490,754,697.46
84	MASANDA	KADUNDUNG	384,746,527.23	89,914,161.88	474,660,689.11
85	MASANDA	PONDINGAO	384,746,527.23	126,583,602.44	511,330,129.67
86	MASANDA	BELAU	384,746,527.23	103,080,167.16	487,826,694.39
87	MASANDA	BELAU UTARA	384,746,527.23	142,227,000.61	526,973,527.84
88	MASANDA	PAKU	384,746,527.23	127,562,951.66	512,309,478.89
89	MASANDA	SESESALU	384,746,527.23	179,612,812.05	564,359,339.28
90	SANGALLA SELATAN	BATUALU	384,746,527.23	135,003,789.60	519,750,316.83
91	SANGALLA SELATAN	TOKESAN	384,746,527.23	130,923,780.59	515,670,307.82
92	SANGALLA SELATAN	BATUALU SELATAN	384,746,527.23	130,593,068.65	515,339,595.88
93	SANGALLA SELATAN	PARU SIRINUN	384,746,527.23	107,431,576.52	492,178,103.75

41	MENGKENDEK	RANTE DADA	384,746,527.23	100,997,217.71	485,743,744.94
42	MENGKENDEK	PA'TENKOKO	384,746,527.23	83,757,377.47	468,503,904.70
43	MENGKENDEK	SIMBUANG	384,746,527.23	153,260,763.93	538,007,291.16
44	MENGKENDEK	PAKALA	384,746,527.23	111,446,027.71	496,192,554.94
45	MENGKENDEK	ULUWAY BARAT	384,746,527.23	101,652,100.12	486,398,627.35
46	MENGKENDEK	MARINDING	384,746,527.23	126,644,134.41	511,390,661.64
47	MENGKENDEK	PALIPU	384,746,527.23	111,192,945.82	495,939,473.05
48	MENGKENDEK	KE'PE TINORING	384,746,527.23	120,017,140.73	504,763,667.96
49	MENGKENDEK	BUNTU DATU	384,746,527.23	92,925,252.41	477,671,779.64
50	SANGALLA	BULIAN MASSA'BU	384,746,527.23	79,431,986.94	464,178,514.17
51	SANGALLA	KAERO	384,746,527.23	120,514,160.77	505,260,688.00
52	SANGALLA	TURUNAN	384,746,527.23	114,683,645.48	499,430,172.71
53	GANDANGBATU SILLANAN	BUNTU LIMBONG	384,746,527.23	162,188,832.02	546,935,359.25
54	GANDANGBATU SILLANAN	SILLANAN	384,746,527.23	110,613,219.56	495,359,746.79
55	GANDANGBATU SILLANAN	GANDANG BATU	384,746,527.23	140,415,821.21	525,162,348.44
56	GANDANGBATU SILLANAN	KADUJAJA	384,746,527.23	141,463,380.38	526,209,907.61
57	GANDANGBATU SILLANAN	GARASSIK	384,746,527.23	81,833,054.98	466,579,582.21
58	GANDANGBATU SILLANAN	PEMANUKAN	384,746,527.23	87,264,089.58	472,010,616.81
59	GANDANGBATU SILLANAN	PERINDINGAN	384,746,527.23	150,698,268.31	535,444,795.54
60	GANDANGBATU SILLANAN	BUNTU TABANG	384,746,527.23	112,257,939.52	497,004,466.75
61	GANDANGBATU SILLANAN	BETTENG DEATA	384,746,527.23	68,251,349.18	452,997,876.41
62	REMBON	PALESAN	384,746,527.23	163,371,420.85	548,117,948.08
63	REMBON	BANGA	384,746,527.23	113,947,691.46	498,694,218.69
64	REMBON	ULLIN	384,746,527.23	95,671,794.11	480,418,321.34
65	REMBON	LIMBONG	384,746,527.23	130,154,674.80	514,901,202.03
66	REMBON	SARAPEANG	384,746,527.23	120,557,885.44	505,304,412.67
67	REMBON	BURI'	384,746,527.23	115,556,349.59	500,302,876.82
68	REMBON	MAROSON	384,746,527.23	147,333,347.66	532,079,874.89
69	REMBON	BATUSURA'	384,746,527.23	105,185,968.84	489,932,496.07
70	REMBON	BUA ' TARRUNG	384,746,527.23	97,305,432.33	482,051,959.56
71	REMBON	TO'PAO	384,746,527.23	110,459,379.60	495,205,906.83
72	REMBON	KAYUOSING	384,746,527.23	182,123,785.90	566,870,313.13
73	MAPPAK	TANETE	384,746,527.23	140,151,263.11	524,897,790.34
74	MAPPAK	DEWATA	384,746,527.23	220,017,996.86	604,764,524.09
75	MAPPAK	MIALLO	384,746,527.23	146,877,033.13	531,623,560.36
76	MAPPAK	SANGPEPARIKAN	384,746,527.23	111,765,985.50	496,512,512.73
77	MAPPAK	BUTANG	384,746,527.23	111,851,893.07	496,598,420.30
78	MAKALE SELATAN	RANDAN BATU	384,746,527.23	200,720,401.83	585,466,929.06
79	MAKALE SELATAN	PATE'KE	384,746,527.23	142,985,414.38	527,731,941.61
80	MAKALE SELATAN	PA'BUARAN	384,746,527.23	221,173,363.28	605,919,890.51
81	MAKALE SELATAN	BO'NE BUNTU SISONG	384,746,527.23	184,145,737.48	568,892,264.71
82	MASANDA	RATTE	384,746,527.23	121,992,911.77	506,739,439.00
83	MASANDA	PALIORONG	384,746,527.23	106,008,170.23	490,754,697.46
84	MASANDA	KADUNDUNG	384,746,527.23	89,914,161.88	474,660,689.11
85	MASANDA	PONDINGAO	384,746,527.23	126,583,602.44	511,330,129.67
86	MASANDA	BELAU	384,746,527.23	103,080,167.16	487,826,694.39
87	MASANDA	BELAU UTARA	384,746,527.23	142,227,000.61	526,973,527.84
88	MASANDA	PAKU	384,746,527.23	127,562,951.66	512,309,478.89
89	MASANDA	SESESALU	384,746,527.23	179,612,812.05	564,359,339.28
90	SANGALLA SELATAN	BATUALU	384,746,527.23	135,003,789.60	519,750,316.83
91	SANGALLA SELATAN	TOKESAN	384,746,527.23	130,923,780.59	515,670,307.82
92	SANGALLA SELATAN	BATUALU SELATAN	384,746,527.23	130,593,068.65	515,339,595.88
93	SANGALLA SELATAN	RARU SIBUNUN	384,746,527.23	107,431,576.52	492,178,103.75

94	SANGALLA UTARA	RANTELA' BI' KAMBISA	384,746,527.23	88,510,531.35	473,257,058.58
95	SANGALLA UTARA	LEATUNG MATALLO	384,746,527.23	114,412,848.31	499,159,375.54
96	SANGALLA UTARA	SALUALLO	384,746,527.23	95,367,983.63	480,114,510.86
97	SANGALLA UTARA	TUMBANG DATU	384,746,527.23	76,272,051.28	461,018,578.51
98	MALIMBONG BALEPE	LEPPAN	384,746,527.23	181,728,241.36	566,474,768.59
99	MALIMBONG BALEPE	KOLE SAWANGAN	384,746,527.23	119,475,040.45	504,221,567.68
100	MALIMBONG BALEPE	KOLE BAREBATU	384,746,527.23	102,215,020.72	486,961,547.95
101	MALIMBONG BALEPE	LEMO MENDURUK	384,746,527.23	210,290,782.69	595,037,309.92
102	MALIMBONG BALEPE	BALEPE'	384,746,527.23	246,334,615.45	631,081,142.68
103	RANO	RANO	384,746,527.23	147,171,906.87	531,918,434.10
104	RANO	RANO UTARA	384,746,527.23	146,544,763.70	531,291,290.93
105	RANO	RUMANDAN	384,746,527.23	143,845,372.77	528,591,900.00
106	RANO	RANO TENGAH	384,746,527.23	148,748,984.73	533,495,511.96
107	RANO	RANO TIMUR	384,746,527.23	143,450,788.41	528,197,315.64
108	KURRA	BAMBALU	384,746,527.23	64,691,535.44	449,438,062.67
109	KURRA	MAROSON	384,746,527.23	119,118,125.10	503,864,652.33
110	KURRA	LIPUNGAN TANETE	384,746,527.23	64,345,863.47	449,092,390.70
111	KURRA	RANTE LIMBONG	384,746,527.23	94,893,073.35	479,639,600.58
112	KURRA	LIMBONG SANGPOLO	384,746,527.23	88,841,833.63	473,588,360.86
<b>Total</b>			<b>43,091,611,049.76</b>	<b>14,363,870,350.24</b>	<b>57,455,481,400.00</b>



BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE